

ABSTRAK

Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai karya masyarakat adat dibutuhkan sebagai bahan baku ekonomi kreatif. Namun penggunaannya ditengarai banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan belum mendapat perlindungan dalam undang-undang secara positif (*Positive Protection*). Maka tujuan penelitian berupaya untuk: 1). menganalisis dan menemukan hakikat eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. 2). Menganalisis dan menemukan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan belum berkeadilan bagi Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan. 3). Menganalisis dan menemukan rekonstruksi hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional keraton surakarta berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris atau normatif empiris dengan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian: 1) Hakikat eksistensi pengaturan pemanfaatan EBT berada pada Konvensi, deklarasi internasional maupun sejumlah perundangan yang memberikan perlindungan secara defensif dan positif. Secara Nasional pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional belum diatur secara positif dalam perundang-undangan di Indonesia. 2). Pemanfaatan EBT Keraton Surakarta belum berkeadilan, dari sisi: a) substansi hukum, ketiadaan norma hukum baik ditingkat Nasional maupun daerah yang mengakui dan menempatkan secara jelas Keraton Surakarta sebagai masyarakat adat dan sebagai entitas pemilik EBT (*owner/Beneficiary*) dari ekspresi budaya tradisional hingga tidak ada pengaturan pemanfaatannya serta sanksi atas pemanfaatan yang tidak sesuai nilai-nilai komunal. b) Struktur hukum, belum ada lembaga yang menaungi terhadap perlindungan atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional baik ditingkat Nasional maupun daerah. c) Kultur hukum, ditunjukkan kultur masyarakat sendiri termasuk pelaku usaha belum menghargai maksud dan tujuan nilai-nilai filosofi ekspresi budaya tradisional dari keraton Surakarta. 3). Rekonstruksi hukum pemanfaatan EBT Keraton Surakarta berbasis nilai keadilan, a) melakukan rekonstruksi nilai-nilai keadilan dengan memberikan pengakuan atas identitas masyarakat adat khususnya Keraton Surakarta sebagai pemilik hak komunal, memberikan keseimbangan antara nilai individu dan komunal dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional dan perluasan kewenangan konkuren daerah dalam perlindungan KI Komunal khususnya pada Keraton Surakarta. c) Rekonstruksi norma hukum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian EBT dalam ketentuan umum, pasal 38 guna, merubah ketentuan pemanfaatan EBT yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga akan harmonis dengan *ius constituendum*. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 15 mengenai urusan pemerintah lampiran sub V urusan kebudayaan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Hukum, EBT, Surakarta, Keadilan

ABSTRACT

Utilization of Traditional Cultural Expressions (EBT) as the work of indigenous peoples is needed as raw material for creative economy. However, many of the uses are suspected to be incompatible with values and have not been positively protected by law. Then the purpose of the study seeks to: 1). analyze and discover the nature of the existence of arrangements for the use of traditional cultural expressions in Indonesia. 2). Analyzing and discovering the use of Traditional Cultural Expressions which are felt to be unfair for the Surakarta Palace as a stakeholder. 3). Analyze and find legal reconstruction using the traditional cultural expression of Surakarta Palace based on the value of justice. The research method used is empirical juridical or empirical normative with constructivism paradigm. The results of the study: 1) The nature of the existence of regulating the use of EBT is in the Conventions, international declarations as well as a number of negotiations that provide defensive and positive protection. Nationally, the regulation on the use of traditional cultural expressions has not been positively regulated in Indonesian law. 2). Utilization of Surakarta Keraton EBT has not been just, in terms of: a) legal substance, the absence of legal norms at both the national and regional level that clearly recognizes and places the Surakarta Palace as an indigenous people and as an EBT owner (owner / Beneficiary) entity from traditional cultural expressions to not there are arrangements for their use and sanctions for uses that are not in accordance with communal values. b) Legal structure, there are no institutions that shelter the protection of the use of traditional cultural expressions both at the National and regional levels. c) Legal culture, it is shown that the culture of the community itself, including business actors, has not yet respected the intentions and objectives of the philosophical values of the traditional cultural expressions of the Surakarta palace. 3). The legal reconstruction of the use of the Surakarta Keraton EBT based on justice values, a) reconstructing the values of justice by giving recognition to the identity of indigenous peoples, especially the Keraton Surakarta as the owner of communal rights, providing a balance between individual and communal values in the use of traditional cultural expressions and expanding regional concurrent authority. in the protection of Communal Information Commission especially at the Surakarta Palace. c) Reconstruction of legal norms in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the definition of EBT in general provisions, article 38 in use, changes the terms of the use of EBT, which are regulated by laws and regulations so that it will be harmonious with the Ius Constituendum. UU no. 23 of 2014 concerning Regional Government article 15 concerning governmental affairs annex sub V cultural affairs by giving authority to local governments.

Keywords : Reconstruction, Law, Folklore, Surakarta,Justice